



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

TRIWULAN IV (PERIODE OKTOBER – DESEMBER 2025)

Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi

Pemerintah

TRIWULAN IV TAHUN 2025

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN
TRIWULAN IV (PERIODE OKTOBER – DESEMBER 2025)
DI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019

Disahkan di Yogyakarta
Pada Hari Kamis, 12 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA,



SYAFIRIZAL, S.H

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME, akhirnya Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menyelesaikan hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada masyarakat, oleh karena itu kami mengadakan survei ini secara berkala sebagai bagian dari rencana dan sasaran mutu dalam pemeliharaan kualitas layanan yang telah dicapai. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

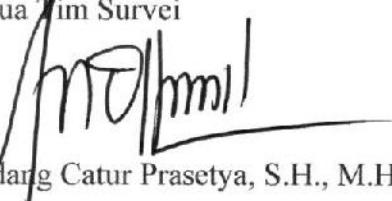
Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pennguna dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini bertujuan meminta pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang diambil dengan menggunakan aplikasi *e-Survey* yang dikembangkan oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan - perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas dan masyarakat pengguna layanan kami.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Ketua Tim Survei



Andang Catur Prasetya, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN -----	1
KATA PENGANTAR-----	2
DAFTAR TABEL -----	4
DAFTAR GRAFIK -----	5
BAB I PENDAHULUAN-----	6
A. Latar Belakang -----	6
B. Tujuan -----	6
C. Sasaran -----	7
D. Landasan Hukum-----	7
E. Definisi-----	7
BAB II METODOLOGI -----	8
A. Metodologi Penelitian-----	8
B. Populasi Dan Sampel-----	8
C. Pelaksanaan Dan Teknik Survei-----	8
C. Teknik Analisis Dan Evaluasi-----	9
D. Prosedur Survei-----	10
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) -----	11
A. Profil Responden-----	11
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator-----	13
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja -----	18
D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. -----	18
BAB IV PENUTUP-----	20
A. Kesimpulan -----	20
B. Rekomendasi -----	21
C. Penutup-----	21
LAMPIRAN -----	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden	11
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden	11
Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden	12
Tabel 4. Usia Responden	13
Tabel 5. Indeks Pada Indikator Diskriminasi Pelayanan	13
Tabel 6. Indeks Pada Indikator Pelayanan Diluar Prosedur.....	14
Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penerimaan Imbalan/Suap.....	15
Tabel 8. Indeks Pada Pungutan Liar	16
Tabel 9. Indeks Pada Indikator Percaloan.....	17
Tabel 10. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	18
Tabel 11. Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta	19

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jenis Kelamin Responden.....	11
Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden	12
Grafik 3. Pekerjaan Responden.....	12
Grafik 4. Rentang Usia Responden.....	13
Grafik 5. Indikator Diskriminasi Pelayanan	14
Grafik 6. Indikator Pelayanan Dilaur Prosedur.....	14
Grafik 7. Grafik 7. Indikator Penerimaan Imbalan/Suap	15
Grafik 8. Indikator Pungutan Liar.....	16
Grafik 9. Indikator Percaloan.....	17
Grafik 10. Indeks Persepsi Anti Korupsi	18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian / Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai unit eselon I penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh *Transparency International Indonesia*. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) di lingkup Pengadilan Negeri Yogyakarta.

B. Tujuan

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

C. Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

D. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025.

E. Definisi

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 5 (lima) tindakan korupsi terdiri dari:

1. Diskriminasi pada pelayanan
2. Pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan
3. Penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku.
4. Pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima.
5. Praktek percaloan/perantara yang tidak resmi.

BAB II METODOLOGI

A. Metodologi Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi Dan Sampel

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan masing-masing unit dengan memperhatikan tingkat keterwakilan jumlah sampel terhadap populasi melalui sistem pemilihan secara acak. Responden yang dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan masing-masing unit pelayanan.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan **tabel sampel dari Krejcie and Morgan** (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung dengan menggunakan rumus: $S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$ dimana:

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan $dk = 1$, taraf kesalahan bisa 1 %, 5%, 10 %

N = populasi P (populasi menyebar normal) = $Q = 0,5$ $d = 0,0$

Dengan memperhatikan jumlah pegawai aparatur peradilan pada lingkungan peradilan umum kurang lebih sebanyak 17.000 orang, maka merujuk pada **tabel sampel dari Krejcie and Morgan** dapat ditentukan jumlah responden sebanyak 133 orang.

C. Pelaksanaan Dan Teknik Survei

Survei indeks persepsi korupsi terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri yogyakarta dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarluaskan elektronik kuesioner (e- survey) sebagai alat pengumpul data. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik

pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian yaitu masyarakat yang menerima pelayanan di Pengadilan Negeri yogyakarta selama periode triwulan IV Tahun 2025. Adapun tahapan survei adalah sebagai berikut:

a. Persiapan

- i. Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei IPAK.
- ii. Membangun e-survey berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
- iii. Membuat surat pengantar pengisian survei melalui e-survey.

b. Proses Survei

- i. Pelaksanaan e-survey dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SISUPER (Sistem Informasi Survei Pelayanan Elektronik) yang telah disematkan pada website Ditjen Badilum.
- ii. Penginputan data survei persepsi anti korupsi melalui E-survey dilakukan dengan mengakses link berikut:
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
- iii. Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem e-survey untuk mengetahui perkembangan e-survey.

c. Teknik Analisis Dan Evaluasi

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 — 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk *skoring*/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti semakin BERSIH DARI KORUPSI. Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
- b. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 — 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 1 - 4. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 — 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik

d. Prosedur Survei

Responden dapat mengisi e-survey persepsi korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta baik melalui komputer/laptop/smartphone. Sebelum menjawab e-survey, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, Nomor Telpon dan pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat SPAK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam e-survey. Adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Diskriminasi pada pelayanan
2. Pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan
3. Penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku
4. Pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima
5. Praktek percaloan/perantara yang tidak resmi.

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

A. Profil Responden

1. Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa total pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 133 responden, dimana pengguna layanan yang berjenis kelamin Laki — Laki sebanyak 58 orang atau 43,60% dan yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 75 orang atau 56,39%.

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Laki - Laki	58	43,60
2	Perempuan	75	56,39
	Jumlah	133	100

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini;



Grafik 1. Jenis Kelamin Responden

2. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut

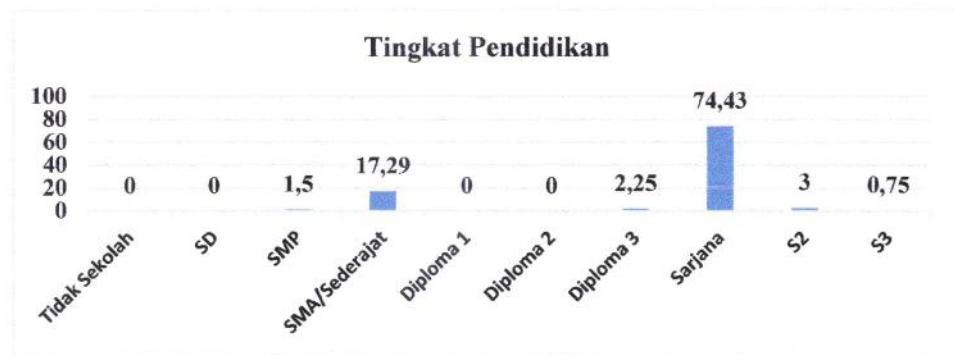
No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	2	1,50
4	SMA/Sederajat	23	17,29
5	Diploma 1	0	0
6	Diploma 2	0	0
7	Diploma 3	3	2,25
8	Sarjana	99	74,43
9	S2	4	3,00
10	S3	1	0,75
	Jumlah	133	100

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

Dari gambaran tabel diatas bahwa dari latar belakang pendidikan, pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mayoritas memiliki latar

belakang tingkat pendidikan sarjana sebanyak 99 orang atau 74,43%.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden

3. Pekerjaan Responden

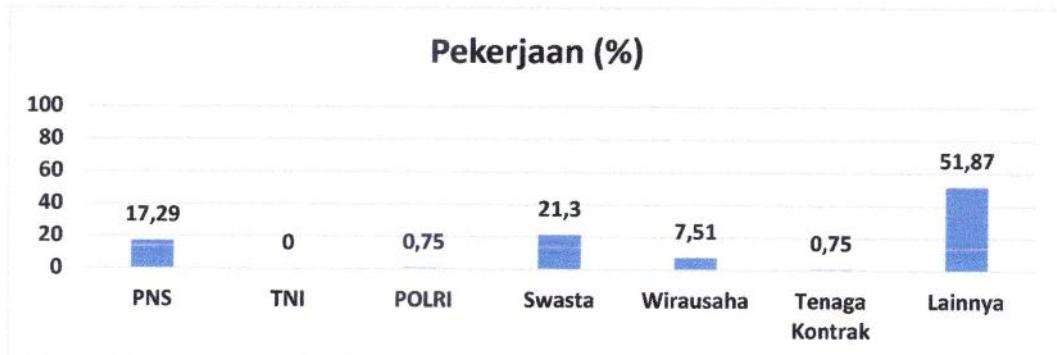
Dari sisi jenis pekerjaan responden, dari hasil survey diperoleh data sebagai berikut

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	PNS	23	17,29
2	TNI	0	0
3	POLRI	1	0,75
4	Swasta	29	21,30
5	Wirausaha	10	7,51
6	Tenaga Kontrak	1	0,75
7	Lainnya	69	51,87
Jumlah		133	100

Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden

Dari table diatas menunjukkan bahwa responden atau mayoritas pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mememiliki pekerjaan lainnya sebanyak 69 orang atau 51,87%.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 3. Pekerjaan Responden

4. Kelompok Usia Responden.

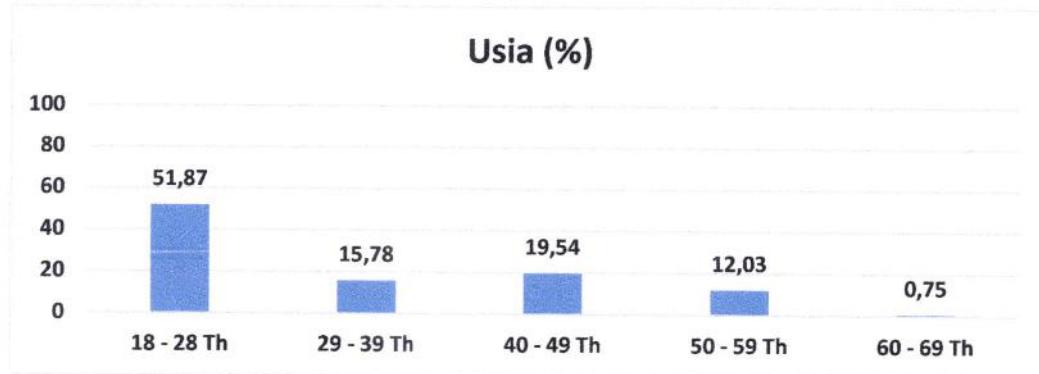
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan kelompok usia, dari hasil survey diperoleh data sebagai berikut :

Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
18 - 28 Th	69	51,87
29 - 39 Th	21	15,78
40 - 49 Th	26	19,54
50 - 59 Th	16	12,03
60 - 69 Th	1	0,75
Total	133	100

Tabel 4. Usia Responden

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia 18 – 28 Tahun sebanyak 69 orang dengan persentase sebesar 51,87% dari total responden sebanyak 133 responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 4. Rentang Usia Responden

B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

1. Diskriminasi Pelayanan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator diskriminasi pelayanan menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	2	1,50
4	Tidak Ada	4	131	98,49
	Jumlah		133	100

Tabel 5. Indeks Pada Indikator Diskriminasi Pelayanan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. Indikator Diskriminasi Pelayanan

Dari 133 responden yang menjawab tidak ada sebanyak 131 orang atau 98,49% responden menyatakan tidak ada diskriminasi pelayanan, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat diskriminasi pelayanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi *SiSuper* diperoleh data sebagai berikut :

DISKRIMINASI PELAYANAN	
Jumlah	530
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisioner)	3,985
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5))	0,797

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konyversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,993 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

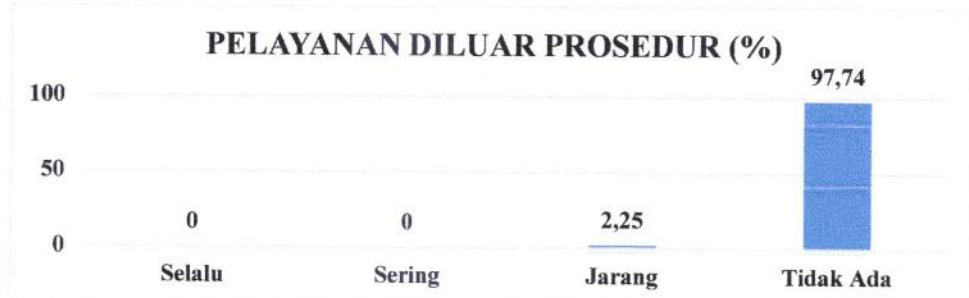
2. Indikator Pelayanan Diluar Prosedur.

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan diluar prosedur menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	3	2,25
4	Tidak Ada	4	130	97,74
Jumlah			133	100,00

Tabel 6. Indeks Pada Indikator Pelayanan Diluar Prosedur

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 6. Indikator Pelayanan Diluar Prosedur

Dari 146 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 133 orang atau 97,74% responden menyatakan *tidak ada pelayanan diluar prosedur*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pelayanan diluar prosedur pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper diperoleh data sebagai berikut :

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR	
Jumlah	529
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisioner)	3,977
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5))	0,795

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,979 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

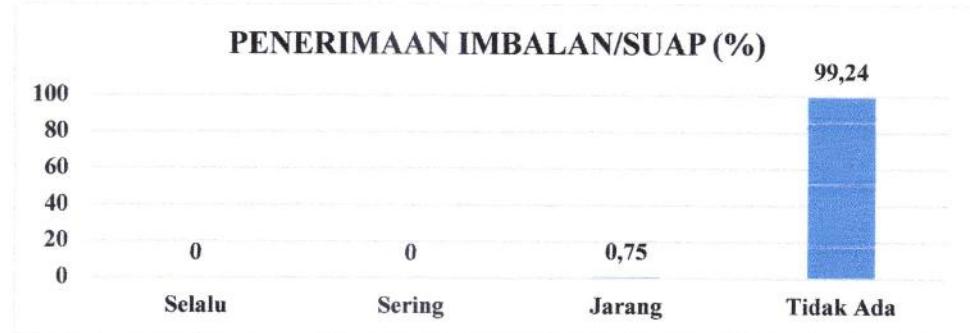
3. Penerimaan Imbalan/Suap

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Penerimaan Imbalan/Suap menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	1	0,75
4	Tidak Ada	4	132	99,24
Jumlah			133	100,00

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penerimaan Imbalan/Suap

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 7. Grafik 7. Indikator Penerimaan Imbalan/Suap

Dari 133 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 132 orang atau 99,24% responden menyatakan *tidak ada Penerimaan Imbalan/Suap*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penerimaan imbalan/suap pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper diperoleh data sebagai berikut :

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR		
Jumlah		531
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kusioner)		3,992
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5)		0,798

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,000 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

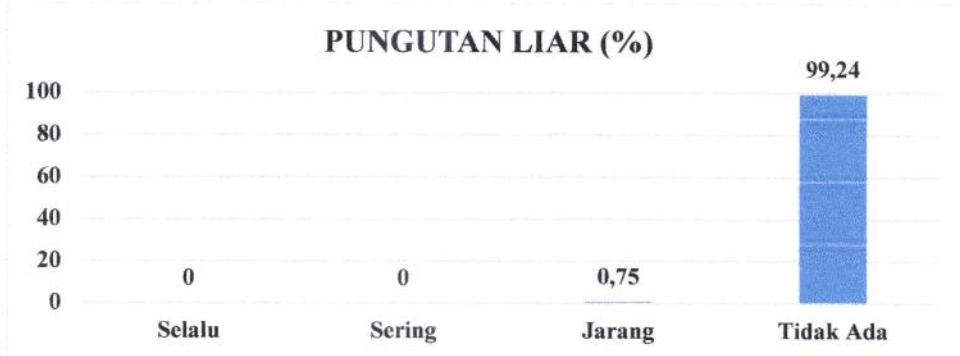
4. Indikator Pungutan Liar

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Pungutan Liar menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	1	0,75
4	Tidak Ada	4	132	99,24
Jumlah			133	100,00

Tabel 8. Indeks Pungutan Liar

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 8. Indikator Pungutan Liar

Dari 146 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 132 orang atau 99,24% responden menyatakan *tidak ada Pungutan Liar*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pungutan liar pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi *SiSuper* diperoleh data sebagai berikut :

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR		
Jumlah		531
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kusioner)		3,992
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5)		0,798

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,000 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

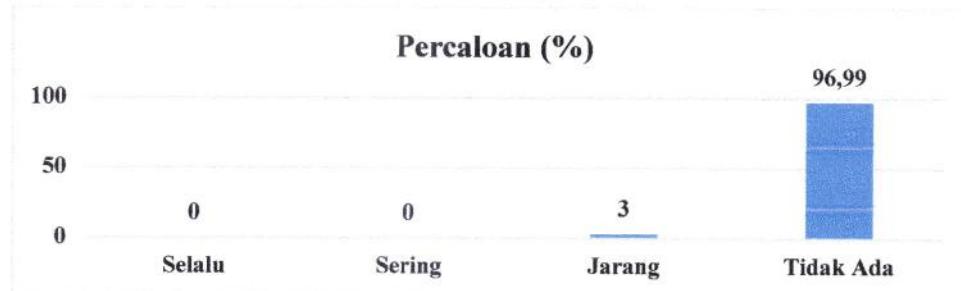
5. Indikator Percaloan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Percaloan menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	4	3
4	Tidak Ada	4	129	96,99
	Jumlah		133	100,00

Tabel 9. Indeks Pada Indikator Percaloan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 9. Indikator Percaloan

Dari 133 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 129 orang atau 96,99% responden menyatakan *tidak ada Pungutan Liar*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pungutan liar pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi *SiSuper* diperoleh data sebagai berikut :

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR	
Jumlah	528
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	3,970
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5))	0,794

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,000 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja

Dari 5 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta sebesar 99,59.

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-Rata	Ranking
Q ¹	Indikator Diskriminasi Pelayanan	3,985	1
Q ²	Indikator Pelayanan Diluar Prosedur	3,977	3
Q ³	Indikator Penerimaan Imbalan/Suap	3,992	4
Q ⁴	Indikator Pungutan Liar	3,992	5
Q ⁵	Indikator Percaloan	3,970	2

Tabel 10. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.



Grafik 10. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks total 3,983 jika dikonversi menjadi prosentase menjadi 99,59% yang selanjutnya jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**, dimana nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada nilai interval 3,26 – 4,00 dan nilai interval konversi angka 81,26 - 100.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

Tabel 11. Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dinilai bebas dari praktik-praktik koruptif oleh masyarakat pengguna layanan. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata pada seluruh indikator yang masing-masing memperoleh skor 99,59%, yang termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Adapun rincian nilai masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-Rata	Ranking
1	Indikator Diskriminasi Pelayanan	3,985	1
2	Indikator Percaloan	3,97	2
3	Indikator Pelayanan Diluar Prosedur	3,977	3
4	Indikator Penerimaan Imbalan/Suap	3,992	4
5	Indikator Pungutan Liar	3,992	5

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak mengalami atau tidak melihat adanya indikasi tindakan koruptif dalam proses pelayanan publik, baik dalam bentuk diskriminasi, penyimpangan prosedur, suap, pungli, maupun percaloan.

Dari hasil survey yang menujukan indikator bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta bersih dari korupsi tetapi masih ada tiga unsur terendah, yaitu :

1. Praktek percaloan dengan nilai 528 dan NRR Per RL 3,970 serta NRR Tertimbang sebesar 0,794 jika nilai – nilai tersebut dikonversikan dalam tabel Persepsi Anti Korupsi masuk dalam bersih dari korupsi.
2. Persyaratan Diluar Prosedur dengan nilai 529 dan NRR Per RL 3,977 serta NRR Tertimbang 0,795 jika nilai – nilai tersebut dikonversikan dalam tabel Persepsi Anti Korupsi masuk dalam bersih dari korupsi.
3. Dikriminasi Pelayanan dengan nilai 530 dan NRR Per RL 0,797 serta NRR Tertimbang 0,797 jika nilai – nilai tersebut dikonversikan dalam tabel Persepsi Anti Korupsi masuk dalam bersih dari korupsi.

Dan laporan tindak lanjut dari tiga unsur terendah ini akan dibuat laporan secara terpisah.

B. Rekomendasi

Meskipun seluruh indikator memperoleh nilai yang masuk dalam kategori babas korupsi, upaya pencegahan terhadap praktik korupsi harus tetap dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat dijalankan antara lain:

Mempertahankan integritas dan akuntabilitas pegawai, terutama di unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melakukan sosialisasi berkala tentang zona integritas dan larangan gratifikasi kepada masyarakat dan seluruh pegawai.

Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengaduan masyarakat melalui kanal resmi yang transparan dan mudah diakses. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meminimalisir kontak langsung antara pengguna layanan dan petugas, sehingga potensi korupsi dapat dicegah.

Menindaklanjuti hasil survei ini melalui forum internal, untuk menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi.

C. Penutup

Survei ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi. Capaian nilai maksimal pada seluruh indikator menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, dan menjadi modal penting dalam membangun pelayanan publik yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

LAMPIRAN

1. NILAI SURVEY



2. DATA RESPONDEN

JUMLAH	138 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 58 ORANG	
	PEREMPUAN : 80 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 1 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 0 ORG	Diploma 3 : 5 ORG
	SMP : 1 ORG	S1 : 97 ORG
	SMU : 29 ORG	S2 : 3 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 2 ORG
PEKERJAAN	PNS : 9 ORG	SWASTA : 27 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRASAHA : 9 ORG
	POLRI : 1 ORG	TENAGA KONTRAK : 3 ORG
	LAINNYA : 89 ORG	

3. DOMISILI RESPONDEN

Indeks Total	Data Urum Responden	Data Domisili Responden	Data Urum Responden	Data Lataran	Nisa Per Urum
Daerah Domisili					Jumlah (Orang)
1	SUMATERA SELATAN				1
2	DKI JAKARTA				1
3	JAWA BARAT				1
4	JAWA TENGAH				7
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA				124
6	JAWA TIMUR				4

4. UMUR RESPONDEN

indeks Total	Data Umur Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan
Deskripsi				Jumlah (Orang)
18 - 28 Th			85	
29 - 39 Th			12	
40 - 49 Th			17	
50 - 59 Th			22	
60 - 69 Th			2	
Total			138	

5. NILAI PER UNSUR

indeks Total	Data Umur Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur					Keterangan
Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
Jumlah	539	544	536	542	548	541	538	547	540	
NRR Per RL	3,906	3,942	3,884	3,928	3,971	3,920	3,899	3,964	3,943	
NRR Terfimbing	0,498	0,493	0,496	0,491	0,496	0,490	0,487	0,495	0,492	
ZI IPKP Unit Pelayanan										98,17

6. TIGA UNSUR TERENDAH

3 Unsur Terendah	3 Unsur Tertinggi
No.	Unsur
1.	Apakah proseduralur proses pelayanan yang diterapkan pengadilan mudah untuk diikuti ?
2.	Apakah pelugas yang memberikan pelayanan pada pengadilan ini sangat membantu keperluan Bapak/Ibu dengan sigap ?
3.	Apakah informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik (website, tuisan berjalan d) maupun non elektronik (Brosur, banner, poster d)?

7. PENILAIN OLEH RESPONDEN

NO	U1	U2	U3	U4	U5
1	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4

48	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4
66	4	4	4	4	4
67	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4
69	4	4	4	4	4
70	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	3
73	4	4	4	4	4
74	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	3
77	4	4	4	4	4
78	4	4	4	4	4
79	4	4	4	4	4
80	4	4	4	4	4
81	4	4	4	4	4
82	4	4	4	4	4
83	4	4	4	4	4
84	4	4	4	4	4
85	4	4	4	4	4
86	4	4	4	4	4
87	4	4	4	4	4
88	4	4	4	4	4
89	4	4	4	4	4
90	4	4	4	4	4
91	4	4	4	4	4
92	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4
95	3	3	4	4	4
96	4	4	4	4	4
97	4	4	4	4	4

98	4	4	4	4	4
99	4	4	4	4	4
100	4	4	4	4	4
101	4	4	4	4	4
102	4	4	4	4	4
103	4	4	4	4	4
104	4	4	4	4	4
105	4	4	4	4	4
106	3	3	3	3	3
107	4	4	4	4	4
108	4	4	4	4	4
109	4	4	4	4	4
110	4	4	4	4	4
111	4	4	4	4	4
112	4	4	4	4	4
113	4	4	4	4	4
114	4	4	4	4	4
115	4	4	4	4	4
116	4	4	4	4	4
117	4	4	4	4	4
118	4	4	4	4	4
119	4	4	4	4	4
120	4	4	4	4	4
121	4	4	4	4	4
122	4	4	4	4	4
123	4	4	4	4	4
124	4	4	4	4	4
125	4	4	4	4	4
126	4	3	4	4	3
127	4	4	4	4	4
128	4	4	4	4	4
129	4	4	4	4	4
130	4	4	4	4	4
131	4	4	4	4	4
132	4	4	4	4	4
133	4	4	4	4	4